



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
PEMERINTAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

MELIANA BR GINTING
NPM:1415100286

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MELIANA BR GINTING
NPM : 1415100286
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Medan, Agustus 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN


Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Fitri Yani Punggabean, S.E., M.Si


Oktarini Khamilah Srg, S.E., M.Si



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

SKRIPSI INI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : MELIANA BR GINTING
NPM : 1415100286
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA JATU)
JUDUL : ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Medan, Agustus 2019

KETUA



Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si

ANGGOTA II

Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si

ANGGOTA I

Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si

ANGGOTA III

Yunita Gari Rioni, S.E., M.Si

ANGGOTA IV

Aulia, S.E., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: MELIANA BR GINTING
NPM	: 1415100286
Fakultas/Program Studi	: SOSIAL SAINS/AKUNTANSI
Judul Skripsi	: ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Agustus 2019



(Meliana Br Ginting)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MELIANA BR GINTING
Tempat/Tanggal Lahir : BUNGA BARU, 30 JANUARI 1997
NPM : 1415100286
Program Studi : AKUNTANSI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Alamat : JL. BUDI LUHUR GG. KENANGA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi mengikuti ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Medan, Agustus 2019



(Meliana Br Ginting)

BEBAS PUSTAKA

No. 2188/Perp/SP/2019

Menyatakan tidak ada sangkut pautnya dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041

Ral : Permohonan Meja Hijau



Medan, 14 Mei 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BUNGSABARU
Tempat/Tgl. Lahir : 30 JANUARI 1997
Nama Orang Tua : KASIANTO GINTING
N. P. M : 1415100286
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 081370956344
Alamat : JL. BUDI LUHUR GG. KENANGA

Ditang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan. Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan pertncian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,250,000

15/05/19

Ukuran Toga :

M

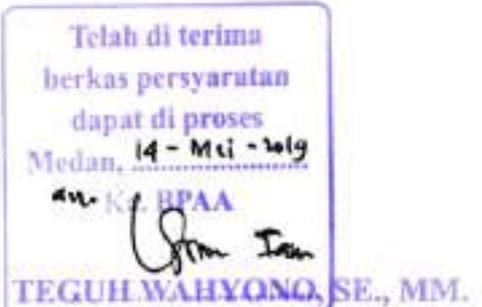
Diketahui/Ditetujui oleh :



- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Nhs.ybs.

Hormat saya

MEGANI BR GINTING
1415100286

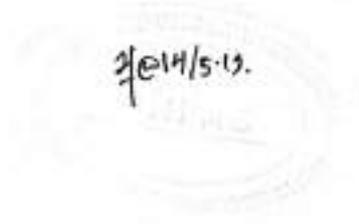


Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

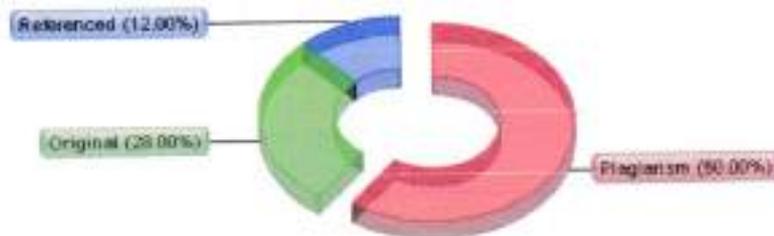
Analyzed document: 28-01-19 12:23:02 PM

"MELIANA BR GINTING_1415100286_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 47	wrds: 5188	https://ilmumanajemenakuntansi.blogspot.com/2013/01/analisis-kinerja-keuangan-pemerinta...
% 40	wrds: 4483	http://docplayer.info/55296281-Analysis-kinerja-pengelolaan-keuangan-daerah-dan-tingkat-ke...
% 40	wrds: 4416	https://jurnal.unived.ac.id/index.php/en/article/download/284/284

Show other Sources:]

Processed resources details:

257 - Ok / 80 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAHAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MELJANA BR GINTING
 Tempat/Tgl. Lahir : Bunga Baru / 30 Januari 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 128 SKS; IPK 3.05
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi	Persetujuan
Analisis rasio efektifitas pendapatan daerah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan	<input checked="" type="checkbox"/>
Analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada kantor Walikota Medan	<input type="checkbox"/>
Analisis kinerja Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak Daerah pada Pemerintah Kota Medan	<input type="checkbox"/>

Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 (Ir. Bheki Alamayah, M. T., Ph.D.)

Medan, 12 April 2018

Pemohon,


 (MELJANA BR GINTING)

Nomor :

Tanggal :

Disahkan oleh

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 12 April 2018

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

(Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing 1 :

(Fitriyani, S.Pd., S.Pd., S.Pd.)

Tanggal : 25-4-2018

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing 2 :

(...)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitriyani Panggabean SE, Msi
 Dosen Pembimbing II : Oktarni Khamilah Srg, SE, Msi
 Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Risiko Efektivitas Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Medan

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/07-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Cover - Kata pengantar - Daftar isi - Daftar tabel - Daftar Gambar - Sistematika penulisan setiap bab - Tinjauan penelitian sebelumnya - Referensi yg ada di minimal 10 tahun (2008) - Skedul proses penulisan - Tinjauan operasional variabel - Sumber dan jenis data - Identifikasi lokasi masalah - Rumusan masalah - hipotesis - kerangka konsep - Daftar pustaka <ul style="list-style-type: none"> o/ tesam abjad o/ penelitian daftar pustaka sesuai prosedur 		

Medan, 20 Juli 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



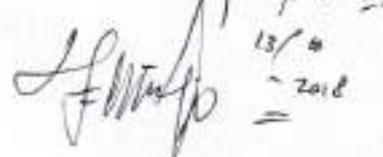
Dr. Gurya Nisa, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitriani Panggabean, SE, Msi
 Dosen Pembimbing II : Oktanni Khamilah Sag, SE, Msi
 Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
 Bidang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.

TANGGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21/10-2018	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel operabilitas variabel (Sukses dan tidak berhasil) - Daftar pustaka. - Uraian 3, PP dist 		
	<p>Ace Seminar Proposal</p>  <p>13/10/2018</p>		

Medan, 20 Juli 2018
 Diketahui/Ditetapkan oleh :





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

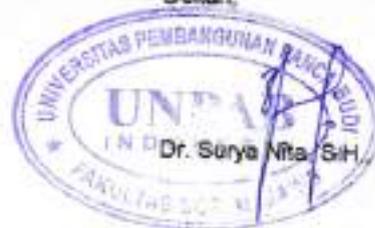
Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitriyani Panggabean SE. M.Si.
 Dosen Pembimbing II : Oktarini Khamilah SRS. S2. M.Si.
 Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
 jenjang Pendidikan : Strata (S1)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Risiko Efektivitas Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
27-8-2018	Perbaiki sistematika penulisan proposal dari Bab 1 s/d Bab 3	<i>[Signature]</i>	
2-9-2018	Perbaiki sistematika penulisan di tabel waktu penelitian, dan tabel definisi operasional	<i>[Signature]</i>	
15-9-2018	Perbaiki sistematika penulisan di cover, dan daftar pustaka Acc & Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

Dosen Pembimbing II
[Signature]
 Oktarini Khamilah SRS

Medan, 20 Juli 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan

[Signature]
 Dr. Surya Nita S.H. M.Hum.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si
 Dosen Pembimbing II : Oktarini Khomillah Srg, S.E., M.Si
 Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
 Bidang Pendidikan : SI

Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah
 Pada Pemerintah Kota Medan

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
101 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Bilan pada pershyuan/ujian - Icam penguat - Daftar di - Sistematis - Defini operasi - Iahur belabag Masul - Sumber data - Identifikasi masalah - Sumber referensi 2019 - Unday? - Daftar Mappij P-5 - Data L. Apad - Daftar pastab. - Iaupi - pengakuan - rbtatib & luhur Mijss ds 		

Medan, 21 Januari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si.
Dosen Pembimbing II : Oktarina Khamilah Srg, S.E., M.Si.
Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
Bidang Pendidikan : St.
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis kinerja keuangan Daerah
pemerintah Kota medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25/01/2019	<ul style="list-style-type: none">- Data Laporan APBD.- Daftar pertukaran- Trans- Bab 1 (Catr Belales)		
	<p>Ace Sdas Smpn 25/01/2019</p>		

Medan, 21 Januari 2019

Diketahui/Ditetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Toni Panggabean, SE, M.Si
Dosen Pembimbing II : Oktarni Khamilah Srg, SE, M.Si
Nama Mahasiswa : MELIANA BR GINTING
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100286
Tempat Pendidikan : SL
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Daerah
pada Pemerintah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1-2019	Perbaiki Estematika penulisan Skripsi ttg penomoran & Bal2, Sumber setiap tabel, Sumber referensi variabel defenisi operasional, saran ditambah, Gambar kerangka konseptual diperbaiki sesuai dgn variabel analisis penelitian Acc y Sidang Meza Hijau		

Medan, 21 Januari 2019

Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend.Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 50 200 511 PO.BOX.1099 Medan.
<http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

ini Jumat..... Tanggal 02 Oktober November 2018 Pukul 19:00... Wib, bertempat di Seminar Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan telah dilaksanakan Seminar kepada :

- : Meliana br Ginting
- : 1415100286
- Studi : Akuntansi
- ripsi : Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah untuk mengukur Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan.
- bing - I : Fitri Yani Panggabean, SE., M.Si
- bing - II : Oktarni Khamilah Gregor, SE., M.Si

ikan hasil dari Tim Seminar, bahwa Proposal Skripsi (Out Line) yang diseminarkan dianggap **Layak / Layak**, dan masih Perlu disempurnakan dengan materi sebagai berikut :

Materi Perbaikan

Tabel skedul penelitian diperbaiki.
Tecni Bab 2 diperbaiki dengan menampilkan Laporan Keuangan Kinerja Keuangan. Ganti judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan dgn variabel Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dll.

Team Penguji,
 Pembimbing - I

[Signature]

Fitri Yani Panggabean, SE, M.Si
DEKATKAN KEANGGARAN, SE, M.Si

Diketahui Oleh,
 Ketua Program Studi



Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si

Pembimbing - II

[Signature]

Oktarni Khamilah Gregor, SE, M.

SE, M.Si



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 PO.BOX.1099 Telp. (061) 50200511 Medan
fssosa@pancabudi.ac.id http://www.pancabudi.ac.id

BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, *Rabu* Tanggal, *10* Bulan, *Juli* Tahun, *2019*, telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi *Akuntansi* Semester Tahun Akademik *2019* bagi mahasiswa/i atas nama :

1. Nama : *Meliana br Ginting*
2. Npm : *1915100286*
3. Program Studi : *Akuntansi*
4. Tanggal Ujian : *10 Agustus 2019*
5. Judul Skripsi Lama : *Analisis rasio efektivitas pendapatan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah Daerah Kota*
6. Judul Skripsi Baru : *Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Medan*

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANG
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	<i>Anggi Pratama Nauron, SE, Msi</i>	
2	Anggota I/ Pembimbing I	<i>Fitri Yani Panggabean, SE, Msi</i>	
3	Anggota II/ Pembimbing II	<i>Oktarni Khamilah srg, SE, Msi</i>	
4	Anggota III/ Penguji I	<i>Tunto Sari Rani, SE, Msi</i>	
5	Anggota IV/ Penguji II	<i>Aulia, SE, MM</i>	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan periode tahun 2009-2017. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif. data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan daerah mengalami pertumbuhan. Kinerja keuangan daerah kota Medan yang diukur tahun 2009-2017 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan tercapainya target penerimaan pendapatan daerah kota Medan. pada tingkat rasio derajat desentralisasi fiskal tahun anggaran 2009-2017 mengalami peningkatan cukup baik sebesar 37,4%. Rasio kemandirian keuangan daerah kota Medan tahun 2009-2017 memiliki pola hubungan konsultatif dan partisipatif yang artinya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat mulai berkurang. Rasio efektivita PAD tahun 2009,2011-2015 memiliki kriteria tidak efektif sebesar 90,10%, 89,20%, 72,00%,76,40%, 34,50% dan 78,70% dan ditahun 2010,2016,2017 mengalami kriteria efektif sebesar 107,40%,154,70%, dan 105,30%%. Rasio efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2014 dan 2017 memiliki kriteria cukup efisien. Rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan rasio keserasian memfokuskan pada belanja operasi yang artinya belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.

Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the financial performance of developments in the financial performance of the municipal government of Medan in the period 2009-2017. This study uses descriptive quantitative analysis techniques. The data used in this study was obtained from the Central Statistics Agency of Medan. The results showed that financial performance as measured by regional financial ratios experienced growth. The financial performance of the Medan city area measured in 2009-2017 has increased. This is due to the achievement of the revenue target of the city of Medan. at the level of the degree of fiscal decentralization, the 2009-2017 budget year experienced a good increase of 37.4%. The regional autonomy ratio of the city of Medan in 2009-2017 has a pattern of consultative and participatory relations, which means that the level of dependence on the central government begins to decrease. The effectiveness ratio of PAD in 2009, 2011-2015 has ineffective criteria of 90.10%, 89.20%, 72.00%, 76.40, 34.50% 37.90% and 78.70% and in 2010, 2016 and 2017 experienced criteria effective at 107.40%, 154.70% and 105.30%. The regional financial efficiency ratios of the 2014 and 2017 fiscal years have criteria that are quite efficient. The growth ratio has increased and the harmony ratio focuses on operating expenditure, which means that the capital expenditure used to provide community economic infrastructure tends to be small.

Keywords: Regional Financial Ratios and Regional Financial Performance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya serta kasih yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Anilisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Dari tahap penulisan skripsi ini sampai dengan selesai, penulis banyak mendapatkan bantuan semangat, bimbingan serta fasilitas dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Fitri Yani Panggabean, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
6. Teristimewa untuk orang tua penulis, ayahanda Kasianto Ginting dan Ibunda Sukamsiani Br Tarigan serta seluruh keluarga yang telah senantiasa memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Sosial Sains Universitas Pmebangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan bimbingan, pengetahuan, dan pengarahan selama mengikuti perkuliahan.
8. Kepada Lara, Meyrina, Heri dan Astri Sinaga yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis. Terima kasih atas persahabatan yang sangat berkesan selama perkuliahan hingga saat ini.
9. Teman-teman akuntansi serta semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, teknik penyusunan, isi, maupun tata bahasa dan kerapiannya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengahrapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Ahir kata penulis mengucapkan penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan telah mendukung atas penyelesaian skripsi ini.

Medan, Agustus 2019

Penulis,

MELIANA BR GINTING
NPM 1415100286

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HAAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIAT	iv
HALAMAN PERNYATAAN SIDANG	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Kinerja keuangan pemreintah daerah	7
2. Analisis kinerja keuangan keuangan daerah.....	19
a. Rasio derajat desentralisasi fiskal	20
b. Rasio kemandirian keuangan daerah.....	21
c. Rasio efektivitas PAD.....	22
d. Rasio efesiensi keuangan daerah.....	23
e. Rasio pertumbuhan.....	24
f. Rasio keserasian	25
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	32

	C. Jenis Dan Sumber Data..	33
	D. Populasi	33
	E. Variabel Penelitian Dan Defenisi Operasional	34
	F. Teknik Pengumpulan Data	37
	G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Hasil Penelitian.	38
	1. Gambaran umum kota medan..	38
	2. Keadaan alam dan penduduk kota medan.	41
	3. Visi dan misi kota medan.....	43
	4. Struktur organisasi.....	44
	B. Analisis Data.....	45
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	59
	A. Simpulan	59
	B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pengukuran Kinerja Keuangan.....3
Tabel 2.1	Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.20
Tabel 2.2	Pola Hubungan Dan Tingkat Tinggi Kemampuan Daerah.....22
Tabel 2.3	Kriteria Efisien Kinerja Keuangan...24
Tabel 2.4	Mapping Penelitian Sebelumnya.....26
Tabel 3.1	Skedul Proses Penelitian.33
Tabel 3.2	Operasional Variabel.34
Tabel 4.1	Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.46
Tabel 4.2	Perhitungan Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD).47
Tabel 4.3	Rasio Efektivitas PAD.49
Tabel 4.4	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah50
Tabel 4.5	Perhitungan Rasio Pertumbuhan.51
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio Belanja Operasi.52
Tabel 4.7	Perhitungan Belanja Operasi.....53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1. Stuktur Organisasi.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran aktif dari pemerintah daerah dalam mengelola daerah sendiri, merupakan tantangan yang harus diterima oleh pemerintah agar dapat membangun dan mengelola daerah masing-masing dengan baik. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelimpahan wewenang pembangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan, dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus kepentingan daerah masing-masing, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dari Perangkat Daerah tersebut. Dengan demikian perlu dilakukan pengukuran kinerja terhadap pemerintah daerah tersebut.

Pemerintah daerah yang menjadi pihak yang menjalankan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat wajib untuk menyerahkan atau melaporkan pertanggungjawaban daerahnya untuk dilihat dan

dinilai apakah pemerintah daerah telah mengelola keuangan dengan baik atau tidak baik.

Penilaian kinerja terhadap lembaga atau orang tidak hanya berlaku pada lembaga atau orang yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau orang non komersial. Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengelola keuangan termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam lembaga, serta meningkatkan pemerintahan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Tuntutan yang tinggi pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. pengukuran kinerja pemerintah daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut paling tidak untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Ukuran kinerja yang disusun tidak dapat hanya dengan menggunakan satu ukuran. Oleh karena itu perlu ukuran yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Hal inilah yang kadang-kadang membuat konflik. Ukuran kinerja mempengaruhi ketergantungan unit kerja yang ada dalam satu unit kerja.

Analisis kinerja keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-

ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah serta dapat menilai pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kota Medan yang diukur menggunakan rasio keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan

Tahun	RDDF	RKKD	REPAD	REKD	RP	RK	
						RBO	RBM
2009	19.70%	25.10%	90.10%	96.60%	0.00%	77.80%	22.10%
2010	28.50%	40.60%	107.40%	108.00%	37.40%	81.00%	3.10%
2011	36.10%	57.60%	89.20%	110.60%	40.50%	77.50%	3.90%
2012	38.30%	63.00%	72.00%	120.80%	13.70%	81.50%	18.50%
2013	36.80%	58.50%	76.40%	98.40%	4.80%	80.40%	19.60%
2014	27.50%	37.90%	34.50%	80.20%	-130.90%	91.90%	8.10%
2015	33.80%	51.00%	78.70%	103.20%	63.00%	78.80%	21.20%
2016	35.10%	34.80%	154.70%	103.40%	22.70%	41.00%	21.10%
2017	35.10%	73.90%	105.30%	10.40%	7.40%	3.60%	2.50%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas rasio derajat desentralisasi fiskal pada kota medan dimulai dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami penurunan sedangkan untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2009, 2011-2015 berada dalam kriteria tidak efektif untuk rasio efisiensi keuangan daerah dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 berada dalam kriteria tidak efektif lalu untuk rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2014 mengalami penurunan dan rasio keserasian dapat dilihat bahwa pemerintah daerah masih

memperioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil.

Berdasarkan pemasalahan tersebut penelitian ini melakukan analisis terhadap kinerja keuangan daerah pemerintah kota Medan tahun 2009-2017, dengan menggunakan alat ukur analisis rasio keuangan daerah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan yang belum akuntabel sehingga kinerja keuangannya dikategorikan rendah.

2. Batasan Masalah

Mengingat masalah yang akan dihadapi maka penelitian ini lebih terarah dan pembahasanya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasanya pada desentralisasi fiskal, kemandirianan keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio keserasian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan tahun 2009-2017 ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan periode tahun 2009-2017 dengan menggunakan indikator keuangan pada APBD.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk :

a. Bagi penulis

Adanya penelitian ini, untuk memperdalam serta memperluas pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang efektivitas pendapatan daerah dan kinerja keuangan daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hody Adhiantoko (2013) dengan judul penelitian Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pada Kabupaten Blora Tahun 2007-2011) . Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas (X) yaitu Kinerja Keuangan dan 5 variabel terikat (Y) yaitu Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian. sedangkan dalam penelitian ini menggunakan hanya menggunakan variabel 1 variabel bebas dan 6 Variabel Terikat.
2. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2018.
3. Lokasi penelitian : Lokasi penelitian terdahulu di Kabupaten Blora, sedangkan penelitian ini dilakukan di kota Medan.
4. Model penelitian : Dalam penelitian terdahulu menggunakan model analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan model analisa deskriptif.

Perbedaan model penelitian, variabel penelitian, waktu dan lokasi penelitian menjadikan perbedaan yang membuat keaslian penelitian ini dapat terjamin dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sumarjo (2010:112) “Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat”.

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalanya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran. Organisasi sektor publik yang salah satunya pemerintah merupakan organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan

hukum, transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan kepada masyarakat yang meruakan salah satu stakeholder organisasi sektor publik, oleh karena itu pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD selaku wakil rakyat di pemerintah. Dengan asumsi tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengendalian kinerja sendiri dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik pemerintah daerah dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh pemerintah daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Menurut Syamsi (2010:99) “Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri”.

- a. Kemampuan struktural organisasinya, struktur organisasi pemerintah daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.
- b. Kemampuan aparatur pemerinah daerah, aparat pemerintah daerah harus mampu menjalankan tugas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin, dan kejujuran saling menunjang, tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh daerah.
- c. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah daerah

harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

- d. Kemampuan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan peraturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu kemampuan keuangan daerah harus mampu mendukung terhadap pembiayaan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

a. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mardiasmo (2012:121) “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu”:

- 1) Memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah.
- 2) Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Halim (2010:230) “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk digunakan sebagai tolok ukur”.

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.

- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Basis Akrua

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/deficit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

- (1) Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- (2) Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi

kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

c) Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

- (1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan.
- (2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi,

efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- (3) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
- (4) Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau

yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

d) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pospos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya.
- (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

e) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

f) Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek

atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

g) Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara lebih pragmatis. Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- (2) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- (3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- (4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- (5) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

(6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya.

(7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Halim (2011:231) “Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya”.

Dengan demikian setiap Pemerintah Daerah dapat diukur Kinerja Keuangan Daerahnya menggunakan beberapa Rasio Kinerja Keuangan Daerah yang antara lain : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Dearah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Halim (2011:123) “Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah”. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah.

Tabel 2.1. Skala interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Anita Wulandari (2012 : 22)

Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPD_t = Total Pendapatan Daerah tahun t

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Widodo (2012:262) “Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukanpajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus dana darurat dan pinjaman”. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan Ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman

dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim (2011:169)

- 1) Pola hubungan instruktif, di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

c. Rasio Efektivitas PAD

Menurut widodo (2013:126) “Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan

potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Menurut Mahsun (2009:65) “Kriteria Rasio Efektivitas, adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:12) “Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah semakin baik.

Menurut Halim, (2010:234) “Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target

penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya”.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% Keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% – 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Abdul Halim (2011:234)

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Mahmudin (2011:89) “Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian”. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}}$$

Keterangan:

X_t = Data variabel X pada tahun t

$X(t-1)$ = Data variabel X pada tahun t-1

Untuk mengukur rasio pertumbuhan suatu daerah dapat dilihat dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Total Pendapatan Daerah
3. Belanja Operasi
4. Belanja Modal

Menurut Halim (2010:241) “Pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran tahun berjalan dikurangi dengan tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan pendapatan dan pengeluaran tahun sebelumnya agar diketahui seberapa besar pertumbuhannya. Dengan diketahuinya tingkat pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran suatu daerah selama beberapa periode tahun anggaran, maka data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui bagian-bagian atau potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tersebut dapat memperbaiki kinerjanya menjadi lebih baik untuk kedepannya”.

f. Rasio Keserasian

Menurut Halim (2010:236) “Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana”. Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4. Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X dan Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Epivani Rima De Villanova, 2015	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Periode 2009-2012	Variabel X : 1. Rasio Pertumbuhan PAD 2. Rasio Kemandirian 3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi 4. Rasio Aktivitas 5. Rasio Pertumbuhan Variabel Y: 1. Kinerja keuangan pemerintah gunungkidul	Deskriptif	1. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2009-2012 masih sangat kurang. 2. Kinerja pemerintah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien 3. Secara umum kinerja keuangan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung kidul menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang

					masih belum stabil
2	Hony Adhiantok, 2013	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007 - 2011)	<p>Variabel X :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 5. Rasio Keserasian <p>Variabel Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan pemerintah kabupaten Blora 	Deskriptif Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Rasio Keserasian
3	Joko Pramowo (2014), Universitas Udayana	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah kota surakarta)	<p>Variabel x :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Keserasian 4. Rasio Efisiensi 5. Rasio Pertumbuhan 6. Rasio DSCR <p>Variabel Y :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja keuangan daerah 	Deskriptif kuantitatif	Kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 15,83 %(2010) dan 24,44% (2011).
4	Masita Machmud, George Kawung	Analisis Kinerja Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Kemandirian 	Deskriptif Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penelitian,

	dan Wensy Rompas, (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012	Keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Pertumbuhan Variabel Y : 1. Kinerja keuangan daerah		dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang masih belum stabil atau belum begitu baik. 2. Hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun sehingga beberapa rasio keuangan masih menunjukkan trend positif dan trend negatif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih belum matang didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan daerah yang diterima.
5	Nurhayati (2015), Universitas Pasir Pengaraian	Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten rokan hulu	Variabel X : 1. Rasio keuangan Variabel Y : 1. Kinerja keuangan daerah	Deskriptif Kuantitatif	Analisis rasio keuangan pada APBD untuk tahun anggaran 2009-2012 yang diukur dengan rasio kemandirian daerah sangat rendah, tingkat

					<p>kertengantungan keuangan daerah sangat tinggi, rasio efektivitas sangat efektif sedangkan rasio efisien sangat efisien, rasio aktivitas menjelaskan hasil rsio belanja rutin lebih prioritas dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan, rasio pertumbuhan PAD adanya peningkatan yang berfluktuasi dari tahun 2009-2012.</p>
--	--	--	--	--	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sintesis atau ekstrapolasi dari kejadian teori yang mencerminkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis dan merupakan tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel ataupun masalah yang ada dalam penelitian.

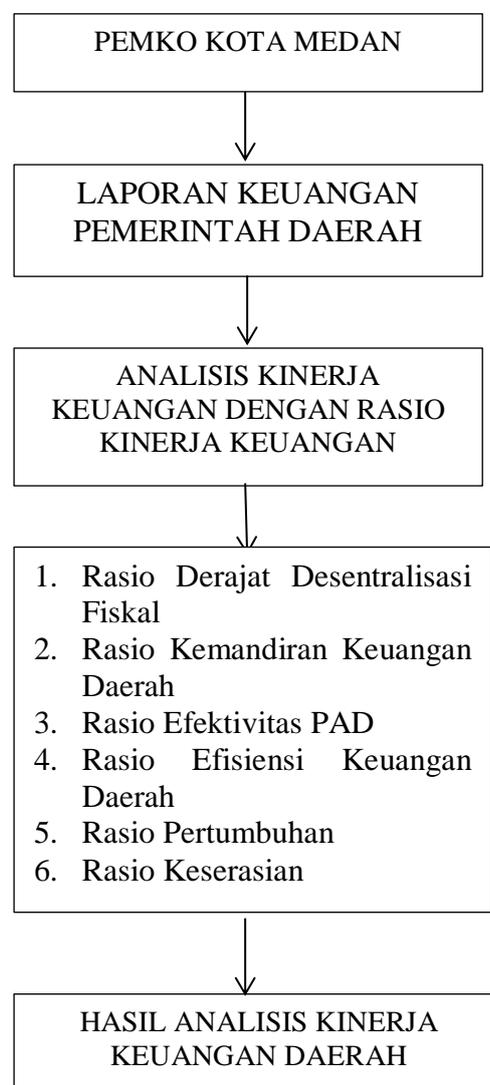
Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total PAD dan ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan

Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya. Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, PAD maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah karena pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk melihat serta menilai sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik organisasi swasta, organisasi publik memerlukan sebuah pengukuran kinerja untuk menilai dan melihat kondisi pertumbuhan daerahnya. Perbedaan organisasi publik dengan swasta organisasi publik lebih mementingkan kesejahteraan rakyat.

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya dikatakan daerah yang sudah mandiri hal ini ditandai dengan berkurangnya ketergantungan daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Dalam melihat kinerja keuangan yang baik pemerintah daerah harus menggunakan perhitungan dengan rasio keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan, rasio keserasian.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:13) “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain”. Dalam penelitian yang dimaksud adalah mengdeskriptifkan tentang rasio efektivitas pendapatan daerah untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kota Medan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kota Medan yang berlokasi di Jl. Gaperta No.311, Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2018 sampai dengan bulan maret 2019. Dengan skedul proses penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Aktivitas	Apr' 18	Mei-okt' 18	nov' 18	Des' 18	Jan' 19	Feb' 19	Mar' 19
1	Riset Awal penganjuan judul							
2	Pembuatan proposal							
3	Seminar proposal							
4	Perbaikan proposal							
5	Pengelolaan data							
6	Penyusunan skripsi							
7	Bimbingan skripsi							
8	Sidang meja hijau							

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Narimawati (2009:98) “Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengumpulkan dokumentasi”. Data sekunder yang berupa data *Time Series* yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Kota Medan. Sumber data dari pemerintah kota Medan yang berupa Laporan APBD kota Medan tahun 2009-2017.

D. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Menurut Sugiyono (2011:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki mutu dan karekteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulan”. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kota Medan.

E. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian mencakup variabel apa yang akan diteliti. Penelitian menggunakan rasio keuangan yaitu rasio desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan dan rasio keserasian.

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. berikut dengan parameter dan skala yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel

Nama/Jenis Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Rasio derajat desentralisasi	$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$	“Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi”. Menurut Halim (2011:123)	Rasio

Rasio kemandirian keuangan daerah	$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$	<p>”Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah”. Menurut Widodo (2012:262)</p>	Rasio
Rasio efektivitas PAD	$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Anggaran PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$	<p>“Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah”. Menurut Widodo(2013:126)</p>	Rasio
Rasio efisiensi keuangan daerah	$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	<p>“Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.</p>	Rasio

		<p>Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.” Menurut Mardiasmo(2013:12)</p>	
Rasio pertumbuhan	$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)}$	<p>“Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Mahmudi (2011) mengatakan “Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian”. Menurut Mahmudin(2011:89)</p>	Rasio
Rasio keserasian	$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$ $\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100\%$	<p>“Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti persentase Belanja Modal yang</p>	Rasio

		digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil". Menurut Halim(2010:236)	
--	--	---	--

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menghitung data-data yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah yang berkaitan dengan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini. Data yang diperlukan penelitian ini ialah data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain. Data yang diperoleh oleh penulis diperoleh dari kantor badan pusat statistik (BPS) kota medan serta mempelajari buku, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis time series pada tahun 2009-2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kota Medan

Kota Medan terletak antara $2^{\circ} 27' - 2^{\circ} 47'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Kota Medan 2,5-3,75 meter di atas permukaan laut. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum berkisar antara $23,0^{\circ} \text{C} - 24,1^{\circ} \text{C}$ dan suhu maksimum berkisar antara $30,6^{\circ} \text{C} - 33,1^{\circ} \text{C}$ serta pada malam hari berkisar $26^{\circ} \text{C} - 30,8^{\circ} \text{C}$. Selanjutnya mengenai kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78%-82%. Sebagian wilayah di Medan sangat dekat dengan wilayah laut yaitu pantai Barat Belawan dan daerah pedalaman yang tergolong dataran tinggi, seperti Kabupaten Karo. Akibatnya suhu di Kota Medan menjadi tergolong panas. Kecepatan angin rata-rata sebesar 0,42 m/sec sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 100,6 mm.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar ($265,10 \text{ km}^2$) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 meter di atas permukaan laut. Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun

1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan.

Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang penentuan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota

Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan, yakni :

- a. Medan Tuntungan dengan 9 Kelurahan
- b. Medan Johor dengan 6 Kelurahan
- c. Medan Amplas dengan 8 Kelurahan
- d. Medan Denai dengan 5 Kelurahan
- e. Medan Area dengan 12 Kelurahan
- f. Medan Kota dengan 12 Kelurahan
- g. Medan Maimun dengan 6 Kelurahan
- h. Medan Polonia dengan 5 Kelurahan
- i. Medan Baru dengan 6 Kelurahan
- j. Medan Selayang dengan 6 Kelurahan
- k. Medan Sunggal dengan 6 Kelurahan
- l. Medan Helvetia dengan 7 Kelurahan
- m. Medan Petisah dengan 7 Kelurahan
- n. Medan Barat dengan 6 Kelurahan
- o. Medan Timur dengan 11 Kelurahan
- p. Medan Perjuangan dengan 9 Kelurahan
- q. Medan Tembung dengan 7 Kelurahan
- r. Medan Deli dengan 6 Kelurahan
- s. Medan Labuhan dengan 7 Kelurahan
- t. Medan Marelan dengan 4 Kelurahan
- u. Medan Belawan dengan 6 Kelurahan

Batas Wilayah Kota Medan Utara Selat Malaka Selatan Pancur Batu, Deli Tua (Kabupaten Deli Serdang) Barat Tanjung Morawa (Kabupaten Deli Serdang) Timur Kota Binjai, Hamparan Perak (Kabupaten Deli Serdang).

2. Keadaan Alam dan Penduduk Kota Medan

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adat istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi. Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun. Berbagai faktor yang mempengaruhi proses penurunan tingkat kelahiran adalah perubahan pola fikir masyarakat dan perubahan sosial ekonominya.

Di sisi lain adanya faktor perbaikan gizi, kesehatan yang memadai juga mempengaruhi tingkat kematian. Koordinat geografis Kota Medan 3° 30'-3° 43' LU dan 98° 35'-98° 44' BT. Permukaan tanahnya cenderung miring ke Utara dan berada pada ketinggian 2,5-37,5 m di atas permukaan laut. Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis dan (3) faktor sosial ekonomi. Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi). Sesuai dengan dinamika pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun

1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 21 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial ekonomis. Secara administratif, wilayah kota medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah

yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya. Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2 kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan saat ini.

3. Visi dan Misi Kota Medan

a. Visi

Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius

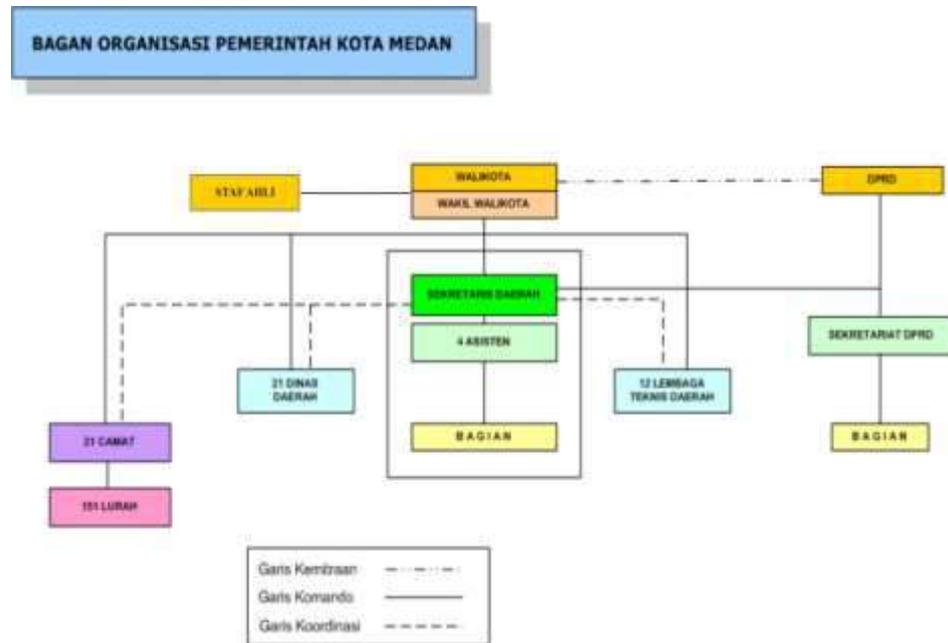
b. Misi

- 1) Kerjasama
- 2) Kreatifitas dan Inovasi
- 3) Kebhinekaan
- 4) Penanggulangan Kemiskinan
- 5) Multikulturalisme

- 6) Tata Ruang Kota yang Konsisten
- 7) Peningkatan Kesempatan Kerja

4. Struktur Organisasi

Pemerintah daerah berkonskuensi dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Fungsi pemerintah kota Medan pada dasarnya dapat dibagi didalam 5 sifat, yaitu pemberian pelayanan, fungsi pengaturan, fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan kota, fungsi pembangunan, fungsi perwakilan. Dalam kaitanya dengan penyelenggaraan desentralisasi di otonom daerah, pemerintah kota Medan menyelenggarakan dua bidang urusan yaitu urusan pemerintah teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas Daeraah, Dinas Kesehatan, Pekerja Umum dan urusan pemerintaah umum, yang terdiri dari kewenangan mengatur diselenggarakan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan, sebagai Badan Legislatif kota berwenang yang bersifat mengatur (segala suatu yang mencakup dalam kekuasaan melaksanakan kebijakan kesejahteraan umu), yang diselenggarakan oleh walikota/wakil walikota, sebagai pimpinan tertinggi badan Eksekutif kota. Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, walikotaa Medan membawahi (pimpinan eksekutif tertinggi) seluruh instansi pelaksana Eksekutif kota. Secara garis besar struktur organisasi pemerintah kota Medan dapat dilihat pada gambar 4.1



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

5. Analisis Data

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Dan Rasio Keserasian untuk menganalisis kinerja keuangan daerah pemerintah daerah kota Medan tahun 2009-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBD) kota Medan yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Medan. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah.

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat di ketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri. Rasio derajat desentralisasi fiskal kota Medan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PDAt}{TPDt} 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Fiskal dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Perhitungan Rasio Daerahat Fiskal

Tahun	PAD (Rp)	TPD(Rp)	DDF (%)	Kemampuan keuangan
2009	Rp. 368.564.026.365	Rp.1.870.374.442.328	19.70%	Kurang
2010	Rp. 588.941.453.691	Rp.2.069.833.895.802	28.50%	Cukup
2011	Rp. 990.300.499.144	Rp.2.742.586.961.424	36.10%	Sedang
2012	Rp.1.147.901.461.607	Rp.2.998.203.912.475	38.30%	Sedang
2013	Rp.1.206.169.709.147	Rp.3.276.344.285.159	36.80%	Sedang
2014	Rp. 522.423.349.626	Rp.1.900.484.785.688	27.50%	Cukup
2015	Rp.1.411.775.146.897	Rp.4.181.096.448.524	33.80%	Sedang
2016	Rp.1.827.196.828.389	Rp.5.203.526.015.404	35.10%	Sedang
2017	Rp. 1.973.780.338563	Rp.5.264.198.010.129	37.50%	Sedang

Sumber : Data Sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan kota Medan jika dilihat dari rasio dejarat desentralisasi dapat dikategorikan sedang. Dimulai pada tahun 2009 rasio

derajat desentralisasi fiskal pada kota Medan sebesar 19.70%. Pada tahun berikutnya dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan. Tahun 2010 sebesar 28.50%, tahun 2011 sebesar 36,10%, tahun 2012 sebesar 38,30%. Tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 36,80% dan 27,50%. Kemudian ditahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 33,80%, 35,10%, 37,50%.

b. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan keadaan tingkat kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembiayai kegiatan sendiri pemerintah daerah. Pembangunan dan pelayan kepada masyarakat, yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlihatkan daerah dalam meningkatkan nilai penerimaan pendapatan daerah.rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) kota Medan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 4.2. Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	RKKD	Pola Hubungan
2009	Rp. 368.564.026.365	Rp.1.465.603.244.963	25.10%	konsulatif
2010	Rp. 588.941.453.691	Rp.1.449.070.282.111	40.60%	konsulatif
2011	Rp. 990.300.499.144	Rp.1.718.727.194.630	57.60%	partisipatif
2012	Rp.1.147.901.461.607	Rp.1.822.682.350.868	63.00%	partisipatif
2013	Rp.1.206.169.709.147	Rp.2.060.845.776.012	58.50%	partisipatif
2014	Rp. 522.423.349.626	Rp.1.378.061.436.062	37.90%	konsulatif
2015	Rp.1.411.775.146.897	Rp.2.769.321.301.627	51.00%	partisipatif
2016	Rp.1.827.196.828.389	Rp.5.247.358.127.628	34.80%	Konsulatif
2017	Rp.1.973.780.338.563	Rp.2.669.308.559.567	73.90%	Partisipatif

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungannya di atas, kemampuan keuangan kota Medan tergolong sudah mandiri dan pola hubungannya adalah konsultatif dan partisipatif. Pola hubungan konsultatif dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi dan daerah dan pola hubungan partisipatif dimana peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah dan pola ini lah yang paling dominan yang terjadi di daerah kota Medan sehingga kemandirian kota Medan belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern sudah mulai berkurang.

c. Rasio efektivitas PAD

Efektivitas merupakan salah satu rasio yang membuktikan bahwa pengaruh dari dampak (outcome) dan output program dalam mencapai tujuan. Kinerja pemerintah daerah kota Medan dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau yang dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja pemerintah daerah kota Medan.

Dalam penelitian ini mengukur efektivitas dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.3. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	REPAD	Kriteria
2009	Rp. 409.026.370.827	Rp. 368.564.026.365	90.10%	tidak efektif
2010	Rp. 548.479.109.229	Rp. 588.941.453.691	107.40%	Efektif
2011	Rp.1.110.469.593.763	Rp. 990.300.499.144	89.20%	tidak efektif
2012	Rp.1.594.454.835.916	Rp.1.147.901.461.607	72.00%	tidak efektif
2013	Rp.1.578.247.819.724	Rp.1.206.169.709.147	76.40%	tidak efektif
2014	Rp.1.515.686.349.626	Rp. 522.423.349.626	34.50%	tidak efektif
2015	Rp.1.794.704.774.012	Rp.1.411.775.146.897	78.70%	tidak efektif
2016	Rp.1.827.196.828.389	Rp.2.827.196.626.490	154.70%	Efektif
2017	Rp.1.873.670.227.452	Rp.1.973.780.338.563	105.30%	Efektif

Sumber : data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan kota Medan pada 2009 sampai tahun 2017 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2009,2011,2012,2013,2014 dan 2015 berada dalam kriteria tidak efektif karena berada dibawah 100%. Pada tahun 2010,2016 dan 2017 mengalami kenaikan dan berada dalam kriteria efektif karena berada .diatas 100%.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya pengangetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

d. Rasio efesiensi keuangan daerah

Proses kegiatan operasional ini dapat dikatakan efisien apabila suatu yang diproduksi atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber dana yang seminimum mungkin.

Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah < 1 atau tidak lebih dari

100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan. Dalam penelitian ini pengukuran efisien dilakukan dengan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	REKD	Kriteria
2009	Rp.1.806.588.720.238	Rp.1.870.374.442.328	96.60%	kurang efisien
2010	Rp.2.235.195.758.724	Rp.2.069.833.895.802	108.00%	tidak efisien
2011	Rp.3.032.799.976.733	Rp.2.742.586.961.424	110.60%	tidak efisien
2012	Rp.3.621.172.391.041	Rp.2.998.203.912.475	120.80%	tidak efisien
2013	Rp.3.224.449.048.408	Rp.3.276.344.285.159	98.40%	kurang efisien
2014	Rp.1.523.890.221.226	Rp.1.900.484.785.688	80.20%	cukup efisien
2015	Rp.4.316.645.669.627	Rp.4.181.096.448.524	103.20%	tidak efisien
2016	Rp.5.380.363.862.404	Rp.5.203.526.015.404	103.40%	tidak efisien
2017	Rp.5.493.560.943.295	Rp.5.641.980.101.129	10.40%	sangat efisien

Sumber : data sekunder diolah ,2018

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2013 berada pada kurang efisien karena berada dibawah 100% tetapi belum efisien. Tahun 2010,2011,2012,2015 dan 2016 rasio efisiensi keuangan daerah kota Medan berada dalam kriteria tidak efisien karena berada diatas 100%. Dan tahun 2014 rasio efisiensi keuangan daerah kota Medan berada dalam kriteria cukup efisien karena berada di bawah 100% sebesar 80.20%. dan tahun 2017 rasio efisiensi keuangan daerah kota Medan berada dalam kriteria sangat bagus sebesar 10.40%. hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Medan kurang cermat dalam menentukan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.

e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)}$$

Tabel 4.5. Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan Awal	Pendapatan Akhir	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
2009	Rp. -	Rp. 368.564.026.365	0,00%
2010	Rp. 368.564.026.365	Rp. 588.941.453.691	37,40%
2011	Rp. 588.941.453.691	Rp. 990.300.499.144	40,50%
2012	Rp. 990.300.499.144	Rp. 1.147.901.461.607	13,70%
2013	Rp. 1.147.901.461.607	Rp. 1.206.169.709.147	4,80%
2014	Rp. 1.206.169.709.147	Rp. 522.423.349.626	-130,90%
2015	Rp. 522.423.349.626	Rp. 1.411.775.146.897	63,00%
2016	Rp. 1.411.775.146.897	Rp. 1.827.196.828.389	22,70%
2017	Rp. 1.827.196.828.389	Rp. 1.973.780.338.563	7,40%

Sumber : data sekunder diolah ,2018

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, pertumbuhan pendapatan tahun 2009 sebesar 0,0%, tahun 2010 sebesar 37,40%, tahun 2011 sebesar 40,50%, tahun 2012 sebesar 13,70%, tahun 2013 sebesar 4,80%, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar -130,90%, tahun 2015 sebesar 63,00%, tahun 2016 sebesar 22,70% dan tahun 2017 sebesar 7,40%. dan pertumbuhan pendapatan yang paling tertinggi terjadi ditahun 2011 dan pertumbuhan pendapatan paling rendah terjadi pada tahun 2014.

Rasio pertumbuhan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode

anggaran, kinerja anggaranya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendapatan daerah yang terjadi pada pemerintah kota Medan untuk tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah kota Medan.

f. Rasio keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Rasio keserasian dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio keserasian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2009	Rp.1.886.588.720.238	Rp.1.468.508.872.280	77,80%
2010	Rp.2.235.195.758.724	Rp.1.810.401.957.278	81,00%
2011	Rp.3.032.799.976.733	Rp.2.349.993.185.530	77,50%
2012	Rp.3.021.172.391.041	Rp.2.462.668.653.257	81,50%
2013	Rp.3.224.449.048.408	Rp.2.593.084.833.763	80,40%
2014	Rp.1.523.890.221.226	Rp.1.400.624.858.087	91,90%
2015	Rp.4.316.645.669.627	Rp.3.401.263.139.634	78,80%
2016	Rp.5.380.363.862.404	Rp.2.204.363.862.404	41,00%
2017	Rp.5.935.609.443.295	Rp.1.998.378.465.395	3,60%

Sumber : data sekunder diolah ,2018

Tabel 4.7. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Rasio Belanja Modal
2009	Rp.1.886.588.720.238	Rp. 417.265.685.949	22,10%
2010	Rp.2.235.195.758.724	Rp. 68.188.126.705	3,10%
2011	Rp.3.032.799.976.733	Rp. 119.580.238.233	3,90%
2012	Rp.3.021.172.391.041	Rp. 558.428.737.784	18,50%
2013	Rp.3.224.449.048.408	Rp. 630.802.958.785	19,60%
2014	Rp.1.523.890.221.226	Rp. 123.220.856.889	8,10%
2015	Rp.4.316.645.669.627	Rp. 915.103.568.576	21,20%
2016	Rp.5.380.363.862.404	Rp.1.190.129.261.883	22,10%
2017	Rp.5.935.609.443.295	Rp.1.352.895.789.273	2,50%

Sumber : data sekunder diolah ,2018

berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa rasio keserasian kota Medan memprioritaskan ke belanja operasi, semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Dapat dilihat tahun 2009 rasio belanja operasi sebesar 77,8% dan rasio belanja modal sebesar 22,1%. Pada tahun 2010 rasio belanja operasi sebesar 81,0% , rasio belanja modalnya sebesar 3,1%. Tahun 2011 rasio belanja operasi sebesar 77,5%, rasio belanja modal sebesar 3,9%. Tahun 2012 rasio belanja operasi sebesar 81,5%, rasio belanja modal sebesar 18,5%. Pada tahun 2013 rasio belanja operasi sebesar 80,4%, rasio belanja modalnya sebesar 19,6%. Tahun 2014 rasio belanja operasi sebesar 91,9%, rasio belanja modal sebesar 8,1%. Tahun 2015 rasio belanja operasi sebesar 78,8%, rasio belanja modal sebesar 21,2%. Tahun 2016 dan tahun 2017 rasio belanja operasi sebesar 41,6% dan 3,6% dan rasio belanja modalnya sebesar 22,1% ,2,5%.

B. Pembahasan

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal

Menurut uraian dari perhitungan tabel 4.1 dapat dilihat kesimpulan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama sembilan tahun pada kota Medan cukup baik dan hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang sangat penting dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di daerah kota Medan relatif tinggi bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sudah mulai membaik sehingga menyebabkan PAD memiliki pengaruh yang besar dalam membiayai pembangunan daerah di kota Medan.

Ada penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) di Blora dijelaskan bahwa kinerja keuangan kabupaten Blora tahun 2007-2011 jika dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal ini tergolong baik karena rata-rata rasionya 36,1%. Hal ini tersebut hamper sama dengan apa yang terjadi di daerah kota Medan dimana kinerja keuanganya sudah baik.

2. Rasio kemandirian keuangan daerah

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirain keuangan daerah selama Sembilan tahun pada pemerintah daerah kota Medan memiliki rata-rata kemandiriannya tergolong baik. Dalam kategori ini kemampuan keuangan pemerintah daerah kota Medan masuk dalam kategori hubungan konsulatif dan partisipatif yang artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan mengingat daerah

yang bersangkutan tingkat kemandirian mendekati kemampuan melaksanakan otonomi daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam interval 25%-50% dan 50%-75%.

Rasio kemandirian yang sudah meningkat mengakibatkan kemampuan keuangan daerah kota Medan dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah semakin membaik dan camour tangan pemerintah pusat mulai menurun. Jadi kemandirian keuangan pemerintah daerah kota Medan secara keseluruhan dapat dikatakan baik, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstren sudah mulai berkurang. Daerah sudah mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembanguan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hony Adhiantoko (2013) di Blora dijelaskan bahwa Rasio Kemandirian mengalami kenaikan sebesar 22,65% dan penurunan sebesar 6,88%. Hal ini tidak sama dengan apa yang terjadi di Kota Medan dimana rasio kemandirian keuangan daerah tergolong baik.

3. Rasio efektivitas PAD

Menurut uraian dan hasil perhitungan pada table 4.3 efektivitas PAD pemerintah daerah kota Medan pada tahun 2009 tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah 100%, dan di tahun 2010 rasio efektivitasnya mulai efektif karena rata-ratanya berada di atas 100%. Di tahun 2011-2015 rasio efektivitas pemerintah daerah kota Medan kembali tidak efektif karena rata-ratanya berada pada di bawah 100%. Di tahun 2016-2017 rasio efektivitas PAD pemerintah daerah kota Medan berada pada rata-rata di atas

100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah tidak sebanding dengan apa yang dianggarkan. Pemerintah daerah kota Medan juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang belum baik dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan pada tahun 2011-2015.

Namun untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah daerah harus terus menerus meningkatkan penerimaan dari potensi pendapatannya. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Hony (2013) di Blora dijelaskan bahwa rasio efektivitas PAD mengalami kenaikan sebesar 7%. Hal ini tidak sama dengan apa yang terjadi Di Kota Medan karena rasio efektifitas PAD kota medan masih tidak efektif.

4. Rasio efisiensi keuangan daerah

Rata-rata efisiensi keuangan daerah kota Medan tergolong masih kurang efisien. Hal ini diakibatkan karena total belanja daerahnya masih tergolong besar jika dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah. Meskipun pemerintah daerah kota Medan sudah dapat menekan belanjanya dari pada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerah. Sehingga dapat dikatakan kinerja pemerintah daerah kota Medan dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja yang telah diminimalisir dan jumlah pendapatan yang didapat cukup tinggi sehingga efisiensi belanja daerah bisa tercapai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hony (2013) di Blora dijelaskan bahwa rasio efisien di Kabupaten Blora kurang efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99,61% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya. Hal ini sejalan dengan rasio efisien di Kota Medan.

5. Rasio pertumbuhan

Menurut uraian dari hasil perhitungannya table 4.5, pemerintah daerah kota Medan di tingkat rasio pertumbuhan PAD yang dikur dari tahun 2009-2017 mengalami naik turun tetapi di tahun 2015 rasio pertumbuhan mengalami penurunan yang sangat jauh sehingga akibat dari penurunan rasio pertumbuhan PAD ini mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan dan pembangunan terhadap kegiatan daerah

6. Rasio keserasian

Menurut uraian dan perhitungannya di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih memprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Medan yang lebih condong pada

pengeluaran-pengeluarn rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah dan belum memperhatikan pembangunan daerah.

Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga pemerintah daerah berkonsentrasi pada pemenuhan belanja perasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemrintah daerah kota Medan tergolong kecil atau belum terpenuhi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan periode 2009 sampai 2017. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil atau dikemukakan, antara lain :

1. Analisa rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Rasio derajat desentralisasi fiskal tahun anggaran 2009 sampai dengan 2017 dikategorikan cukup baik. Kontribusi PAD dalam menyelenggarakan desentralisasi sudah dikatakan cukup baik.
3. Rasio kemandirian keuangan daerah tahun anggaran 2009 sampai dengan 2017 memiliki pola hubungan konsultatif dan partisipatif dimana tingkat ketergantungan ekstern sudah mulai berkurang.
4. Rasio efektivitas PAD tahun anggaran 2009, 2011-2015 memiliki kriteria tidak efektif artinya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah tidak efektif atau tidak mencapai target. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2017 telah efektif yaitu pemerintah telah mencapai target dalam merealisasikan PADnya.

5. Rasio efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2009-2013 dan 2016 masih kategori tidak efisien atau kurang efisien. Sedangkan pada tahun anggaran 2014 dan 2017 kriteria tergolong cukup efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota Medan kurang cermat dalam menentukan berapa besar biaya dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.
6. Rasio pertumbuhan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya terbukti pada perhitungan pertumbuhan pendapatannya.
7. Rasio keserasian pemerintah daerah kota Medan memfokuskan pada belanja operasi yang diartinya belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil.
8. Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya ketidakstabilan kinerja keuangan pemerintah daerah kota Medan, yaitu :
 - a. Terbatasnya sumber daya manusia yang menjadi kendala untuk meningkatkan kinerja keuangan.
 - b. Sistem pengawasan yang kurang efektif akibat kewenangan yang tidak jelas baik dalam peraturan mampu Pratik lapangan.
 - c. Tidak adanya transparansi laporan keuangan sehingga masyarakat kurang berperan dalam pembangunan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kota Medan diharapkan lebih proporsional dalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.
2. Pemerintah daerah kota Medan diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD sehingga ketergantungan pendapatan dan pemerintah pusat bias semakin berkurang.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan lebih mendalami mengenai rasio kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hasil penelitiannya bisa lebih handal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Abdul Halim, 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Medan, 2018. *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2009 -2017*. Medan.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Famli, Faud, M, 2016. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hony Adhiantoko. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.(Studi kasus Kabupaten Blora)*.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah (Edisi 3)*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudin 2011. *Rasio Pertumbuhan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sukabumi*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 12 Nomor 2 Halaman 122-123.
- Mahmudin, 2012. *Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi Univeristas Sumatera Utara*, Volume 5 Nomor 10 Halama 100-102.
- Mahmudin. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta : Erlangga.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.

- Mardiasmo, 2012. *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi, Volume 12 Nomor Halaman 56-57.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta
- Peraturan pemerintah Nomor 71 *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Saragih, juli, panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Suprianto, 2013. *Rasio Efektivitas Dan Efisiensi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 5 Nomor 2 Halaman 68- 84.
- Syamsi, 2010. *Rasio Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, 2012. *Analisis Rasio Kemandirian Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Daerah*, *Jurnal Akuntansi*, Volume 4 Nomor 5 Halaman 98-99.
- Yani, Ahmad. 2012. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.